RENCANA KERJA
(RENJA)
Tahun 2024

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ASAHAN



LAMPIRAN
RENJA 2024



PERHUBUNGAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Tahun 2023 ini dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Asahan dan Renstra Dinas Perhubungan yang disusun dan ditetapkan, guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2021 – 2026.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 ini. Semoga semua rencana kerja yang telah ditetapkan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan kita semua.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kiranya Allah SWT senantiasa melindungi dan meridhoi segala aktifitas kita semua sehingga dapat bernilai ibadah, Amin.

Kisaran, Juli 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ASAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PERHUBUNGAN

SOFIAN MANULLANG S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660212 198602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI..... ii

BAB I
PENDAHULUAN..... 1
1.1 LATAR BELAKANG..... 1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN..... 2
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN..... 4

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023..... 6
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN 10
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS
DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN..... 10

BAB III
TUJUAN, SASARAN DINAS PERHUBUNGAN..... 13
3.1 TUJUAN..... 14
3.2 SASARAN..... 14

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN..... 15

BAB V
PENUTUP 18
LAMPIRAN 19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Tahun 2021 – 2026.

Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan berpedoman kepada Renstra dan RPJMD yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan. Program dan kegiatan di sesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Sebagai penjabaran dari RPJMD dan Renstra OPD, proses penyusunan Rencana Kerja OPD harus berpedoman kepada kedua dokumen tersebut guna terwujudnya sinergi dan sinkronisasi capaian kinerja tahunan masing-masing OPD untuk menunjang capaian kinerja daerah sebagaimana termaksud dalam indikator kinerja pada RPJMD.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahTahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten AsahanTahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan denganPeraturan Daerah Kabupaten Asahan

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (lembar Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3)
21. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perancanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);
22. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten AsahanTahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41);
23. Peraturan Bupati Asahan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 22);

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan sampai Tahun Berjalan
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Tujuan

3.2 Sasaran Dinas Perhubungan

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

Dalam rangka mencapai mencapai tujuan dan sasaran serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan tahun 2023 akan melaksanakan Program dan Kegiatan yang bertahap, terarah dan berkesinambungan.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan telaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Telaah dilakukan dengan melakukan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023. Hampir keseluruhan Program dan kegiatan pada tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan. Pengukuran Program/Kegiatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel I.

Tabel. 2.1
PENGUKURAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2023
Sampai dengan Triwulan ke-II

N0	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BIAYA MENURUT DPA OPD (Rp)	REALISASI			
			FISIK		KEUANGAN	
			(Rp)	(%)	(RP)	(%)
1	2	3	8	9	10	11
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
	Kegiatan:					
	A. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH					
	Sub Kegiatan:					
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.900.000	-	-	-	-
	B. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH					
	Sub Kegiatan:					

		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.299.384.930	1.700.134.144	51,53	1.700.134.144	51,53
	C.		**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**					
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	163.930.000	163.930.000	100	162.855.000	99,34
		2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	81.052.750	-	-	-	-
	D.		**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**					
			Sub Kegiatan:					
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.985.625	5.934.000	59,43	5.934.000	59,43
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.532.500	15.685.500	48,21	15.685.500	48,21
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.378.250	10.848.600	53,24	10.848.600	53,24
		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.065.000	-	-	-	-
		5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.002.500	8.327.500	23,79	8.327.500	23,79
		6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.188.000	5.000.000	49,08	5.000.000	49,08
		7	Penyediaan Bahan/Material	50.356.250	2.517.813	5,00	2.100.000	4,17
		8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000	45.000.000	50,00	40.120.669	44,58
	E.		**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**					
			Sub Kegiatan:					
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	390.000.000	-	-	-	
		2	Pengadaan Mebel	19.671.500	9.600.000	48,80	9.600.000	48,80
		3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	124.103.500	91.230.000	73,51	91.230.000	73,51
	F.		**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**					
			Sub Kegiatan:					
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	3.000.000	60,00	3.000.000	60,00
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.079.622	73.656.416	38,75	73.656.416	38,75
		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.020.000	3.000.000	29,94	3.000.000	9,94
		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.421.669.000	1.194.702.000	49,33	1.194.702.000	49,33
	G.		**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**					
			Sub Kegiatan:					

	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	501.334.150	201.110.608	40,12	201.110.608	40,12
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.433.600	16.300.000	55,38	16.300.000	55,38
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.844.000	-	-	-	-
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**					
	Kegiatan:					
	A. PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/ KOTA					
	Sub Kegiatan:					
	1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100.000.000	-	-	-	-
	B. PENYEDIAAN PERLENGKAAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA					
	Sub Kegiatan:					
	1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	96.278.322	-	-	-	-
	2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	909.800.000	636.860.000	70,00	593.079.500	65,19
	C. PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C					
	Sub Kegiatan:					
	1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	30.000.000	-	-	-	-
	D. PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR					
	Sub Kegiatan:					
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	165.216.525	103.307.500	62,53	103.307.500	62,53
	E. PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR					
	Sub Kegiatan:					
	1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100.000.000	100.000.000	100	98.500.000	98,50

	2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	32.000.000	32.000.000	100	31.482.000	98,38
	3 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	56.694.000	-	-	-	-
	4 Penyediaan Buku Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	100.000.000	100.000.000	100	100.000.000	100
	5 Sosialisasi Standar operasinal Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor	50.130.000	-	-	-	-
	6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	125.997.133	-	-	-	-
	F. PELAKSANAAN MANAJEMEN REKAYASA LALULINTAS					
	Sub Kegiatan:					
	1 Pengadaan, Pemasangan, perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka manajemen rekayasa lalulintas	35.600.000	27.850.000	78,23	27.850.000	78,23
	2 Forum Lalu-Lintas Angutan Jalan	45.000.000	-	-	-	-
	G. PERSETUJIAN HASIL ANALISA DAMPAK LALULINTAS					
	Sub Kegiatan:					
	1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	30.032.500	18.019.500	60,00	17.262.500	57,48
	H. PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Sub Kegiatan:					
	1 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	229.850.000	41.320.000	17,98	41.320.000	17,98
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**					
	Kegiatan:					
	A. PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN DAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN UNTUK KAPAL YANG MELAYANI PENYEBERANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Sub Kegiatan:					
	1 Pengendalian data dan informasi Jaringan Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal	13.684.400	-	-	-	-

	yang Melayani Penyebrangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota					
	2 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	38.656.100	7.862.980	20,34	7.862.980	20,34
	B. PENERBITAN IZIN USAHA JASA TERKAIT DENGAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL					
	Sub Kegiatan:					
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	13.740.800	-	-	-	
	JUMLAH TOTAL	**9.801.610.957**	**4.617.196.560,50**	**47,11**	**4.564.268.917**	**46,57**

Dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan, sampai dengan Triwulan ke-II, kinerja kegiatan dengan pencapaian keseluruhan nilai rata-rata sebesar **46,57%.**

Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan merupakan salah satu OPD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun target dan realisasi pendapatan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan ditunjukkan oleh tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Target dan Realisasi PAD Tahun 2023

Sampai dengan Triwulan -II

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)
1	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	1.910.000.000	476.275.000	24,94
2	Retribusi PKB	650.000.000	251.775.000	38,73
	JUMLAH	**2.560.000.000**	**728.050.000**	**28,44**

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ASAHAN

Berikut ini beberapa capaian indikator kinerja pelayan Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Tahun 2023 sebagaimana di tunjukkan oleh tabel 2.3.

Tabel 2.3.

Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
1	Cakupan Aksebilitas Antar Wilayah	36,00 %	35.50 %	98.61%
2	Persentase layanan angkutan darat	0,00520%	0.00455 %	87.5 %
3	Persentase tahapan pengelolaan pelayaran	50%	15 %	30 %

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN

Sistim dan manajemen transporatasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena memelihara dan mengingkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi baik serta mengembangkan sarana tranportasi pedesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting.

Adapun tantangan urusan wajib yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan antara lain adalah :

1. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat sebagai sumber pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan yang meliputi Fasilitas Keselamatan Jalan, Sarana dan Prasarana Perhubungan di Kabupaten Asahan;
2. Meningkatkan pelayanan angkutan seiring dengan kelesuan yang disebabkan oleh semakin meningkatnya kepemilikan kendaran pribadi;
3. Meningkatkan pendapatan retribusi di bidang perhubungan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Asahan;

4. Mengembangkan transporatasi perairan di wilayah Kabupaten Asahan untuk mendukung program nasional terkait dengan penguatan sector konektifitas antar wilayah;

Faktor – Faktor penghambat yang berpengaruh diantaranya adalah :

1. Sarana dan Prasarana Perhubungan, dan Peralatan Pengujian yang belum optimal sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas;
2. Fasilitas pengatur dan pengamanan lalu lintas berupa perlengkapan untuk fasilitas keselamatan jalan masih terbatas;
3. Pelayanan angkutan umum belum memadai;
4. Pengelolaan parkir yang masih belum berjalan optimal dan masih memerlukan penataan sistem yang lebih baik;
5. Kesadaran masyarakat dalam tertib lalu lintas masih kurang;
6. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang berkompensi pada bidang perhubungan;

Adapun faktor-faktor pendorong dalam pelayanan OPD untuk melaksanakan tugas dan fungsi adalah :

1. Perencanaan daerah yang mengakomodir urusan perhubungan
2. Adanya peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas;
3. Kerjasama yang baik antara Dinas Perhubungan dengan instansi terkait;

Demi terwujudnya Kabupatn Asahan yang "Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan berkarakter", sebagaimana tertera pada Visi Misi pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2021 – 2026, Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan pada tahun 2022 masih mengangkat Isu strategis sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan sebagai instansi teknis pengendali dan pengawas tranportasi yang telah dijabarkan dalam tugas dan fungsinya
2. Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya terkait dengan pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Lebih intensif dalam pelaksanaan kampanye keselamatan berlalulintas terutama pada pengguna tranportasi pemula (pelajar).
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia perhubungan baik melalui keterampilan teknis maupun administrasi.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah adalah visi Kementerian Perhubungan sehingga arah kebijakan pembangunan Kabupaten Asahan bidang perhubungan bertujuan untuk melaksanakan pembangunan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan dalam pelayanan perhubungan darat, laut dan sungai. Keberhasilan sektor transportasi ini didukung oleh sektor pembangunan daerah, lingkungan hidup dan tata ruang, perumahan dan pemukiman. Hal ini dilaksanakan guna mendukung sektor pertanian dan kesehatan, dan pendidikan, yang pada akhirnya sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Asahan.

Berdasarkan tugas, pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dan arah kebijakan sektor transportasi, yaitu :

1. Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan
2. Penguatan implementasi Rencana Induk Jaringan LLAJ
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung LLAJ
4. Peningkatan Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
5. Peningkatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang
6. Pembinaan Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota
7. Peningkatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
8. Peningkatan pengedalian dan pengamanan serta penegakan hukum lalulintas dan angkutan jalan
9. Penyedian sarana dan prasarana angkutan perairan untuk transportasi orang dan barang yang berada di daerah perairan / sungai

3.1 . TUJUAN DINAS PERHUBUNGAN

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan, maka Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan akan mengarahkan strategi dan kebijakan.

3.2 . SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan sasaran merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Sasaran dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagaimana penjelasan pada tabel.3.1.

Tabel. 3.1

TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1	Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	Meningkatnya kwalitas dan kwantitas sarana dan prasarana angkutan umum

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2016-2021, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), untuk pencapaian visi dan misi. Maka Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan tahun 2024 berencana akan melaksanakan **3 Program, 20 Kegiatan dan 54 Sub kegiatan**, yaitu:

KODE					PROGRAM/KEGIATAN
2					**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
2	15				**URUSAN PEMERINTAH PERHUBUNGAN**
2	15	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKP
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2	15	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2	15	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
2	15	02	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	15	03	2.07	05	Pengadaan Mebel
2	15	03	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya

2	15	03	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	15	04	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	15	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkaan Kantor
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	15	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**
2	**15**	**02**	**2.01**		**Penetapan Rencana Induk jaringan LLAJ Kab/Kota**
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2	**15**	**02**	**2.03**		**Pengelola Terminal Penumpang Tipe C**
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
2	**15**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**
2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.05	03	Regestrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Buku Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standart Operasional Prosedur Pengujian Berkala

					Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2	15	02	2.06	03	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2	15	02	2.06	04	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.06	05	Forum lalulintas Angkutan jalan
2	**15**	**02**	**2.07**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**
2	15	02	2.07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
2	**15**	**02**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	**15**	**02**	**2.14**		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**
2	**15**	**03**	**2.07**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**
2	15	03	2.07	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberanga dan Peretujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melyani Penyeberangan dan Perbaikan kapal
2	15	03	2.07	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	**15**	**03**	**2.08**		**Penerbitan izin Jasa terkait dengan peraatan dan perbaikan Kapal**
2	15	03	2.08	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengaasan pelaksaan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal
2	**15**	**03**	**2.10**		**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungn Kepentinga (DLKP) Untuk**

					Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	03	2.10	02	Penetapan kebijakan dan sosialisasi Rencana induk daerah lingkungan kerja (DLKR) dan Daerah lingkungan kepentingan (DLKR) pelabuhan pengumpan lokal
2	15	03	2.10	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	**15**	**03**	**2.14**		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	03	2.14	01	FasilitasiPemenuhanPersyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Rumusan rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif yang akan di laksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan pada tahun anggaran 2024 dapat di lihat pada lampiran Renja Dinas Perhubungan TA.2024.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Tahun 2024, yang didalamnya mencakup Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun secara tahunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana Kerja Tahun 2024, ini merupakan tahun ke-1 pelaksanaan Renstra yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang perhubungan

Penyusunan Renja ini diharapkan agar Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan beserta seluruh jajarannya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2024 tidak terlepas dari peran serta dan tanggungjawab jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan serta peran aktif stakeholder terkait.

Dengan strategi **memantapkan system transportasi antar wilayah guna meningkatkan mobilitas orang dan barang antar wilayah** sehingga dapat tercapainya tujuan untuk **menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilaya**h demi terwujudnya "***Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan berkarakter"*** sebagaimana tertera pada Visi Misi pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2021 – 2026

Kisaran, Juli 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ASAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PERHUBUNGAN

SOFIAN MANULLANG S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660212 198602 1 003

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERHUBUNGAN KAB. ASAHAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERHUBUNGAN						**10.675.177.723,00**							**10.185.177.723,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.675.177.723,00**							**10.185.177.723,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**10.675.177.723,00**							**10.185.177.723,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan***	**-**			**100 %**	**6.885.177.723,00**						**-**	**6.865.177.723,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			8 Dok	15.077.000,00			-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-	-	15.077.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	5.038.500,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-		5.038.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	5.038.500,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-		5.038.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Layanan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 %	3.667.100.723,00			-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-	-	3.667.100.723,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	3.667.100.723,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-		3.667.100.723,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			100 %	355.000.000,00			-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-	-	355.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	165.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-		165.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	100.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				500 Orang	90.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-		90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Layanan administrasi perangkat daerah*	-			100 %	283.000.000,00			-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-	-	283.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	27.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-		27.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-		11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	50.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan*	-			4 Pengadaan	250.000.000,00			-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-	-	250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	100.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	20.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan*	-			12 Bulan	1.929.000.000,00			-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-	-	1.929.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-		8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	181.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-		181.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.720.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-		1.720.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara*	-			4 Sarana	386.000.000,00			-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-	-	366.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	250.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	20.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	100.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	5.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	11.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-		11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***Persentase layanan angkutan darat***	**-**			**0,00649 %**	**3.070.000.000,00**						**-**	**2.620.000.000,00**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Jumlah Rencana Induk yang di tetapkan*	-			2 dok	100.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-	-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan*	-			4 Kegiatan	1.150.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-	-	1.150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				2 Unit	100.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				180 Unit	500.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Kuat	-		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				2 Unit	50.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				10 Unit	500.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Jumlah terminal penumpang*	-			1 Unit	30.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-	-	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C														
			Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.				100 Orang	10.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Jumlah ruas fasilitas parkir yang di selenggarakan*	-			60 Ruas	110.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-	-	110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah pelaksaaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	-			12 Bulan	740.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-	-	740.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				2 Unit	400.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 2. Sumber Daya Manusia Tangguh	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Orang	60.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				4000 Unit	70.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-		70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				4000 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				10 Unit	100.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*jumlah titik kemacetan yang teratasi*	-			70 %	170.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-	-	170.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-		70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas														
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				25 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah rekomendasi yang di keluarkan*	-			5 Dok	20.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-	-	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin														
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				1 Laporan	0,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan 6. Infrastruktur Kuat	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kecamatan yang terlayani angkutan umum*	-			25 Kecamatan	700.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-	-	250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Unit	500.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah izin Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang di terbit kan*	-			5 Unit	50.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-	-	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	***Persentase tahapan pengelolaan pelayaran***	**-**			**100 %**	**720.000.000,00**						**-**	**700.000.000,00**	
	2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lintas Penyeberangan*	-			8 Lintasan	50.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-	-	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.07.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.08	Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	*Jumlah unit usaha terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal*	-			10 Unit Usaha	20.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.08.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	*Jumlah penetapan rencana induk*	-			0 Kecamatan	600.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-	-	600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.10.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.10.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.14	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	*Jumlah unit usaha ntuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal*	-			5 Unit	50.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-	-	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.14.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 6. Infrastruktur Kuat	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H							**10.675.177.723,00**							**10.185.177.723,00**	

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ASAHAN

NOMOR :

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ASAHAN

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporandan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten

Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (lembar Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3)

21. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perancanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);

22. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41);

23. Peraturan Bupati Asahan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ASAHAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024.

KESATU : Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dimaksud, tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

1. BAB I. PENDAHULUAN.
2. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.
3. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.
4. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
5. BAB V. PENUTUP

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kisaran
Padatanggal: Juli 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ASAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PERHUBUNGAN

SOFIAN MANULLANG S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660212 198602 1 003

Tembusan :
Bupati Asahan sebagai laporan